

PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT DIITINJAU DARI KESETARAAN GENDER

(STUDI KASUS DI DESA ADAT KESIMAN DENPASAR TIMUR)

Sandy Annisa Unzila

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sandyannisaa@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that highly upholds human rights. Gender inequality is often a problem that occurs and is experienced by women. Indonesia is rich in culture and customs, each region has its own customs which are still strong today and are part of everyday life. One of them is Bali, Bali is known to be very thick with its customs. The Hindu community in Bali adheres to a patrilineal kinship system or male lineage known as the Purusa system. The government system in the Kesiman Traditional Village uses the purusha system to run the traditional village governance system itself. This Purusa system positions men above women, especially in the public sphere. In the government system in the Kesiman Traditional Village, women are not involved much in their participation in activities in the public sphere, women participate more in the private space. This research uses the Empirical Law research method, the data obtained is in the form of interview results, and uses legal theory.

Keywords: Gender Equality, Traditional Village, Roles, Woman, Government Systems

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ketidaksetaraan gender sering menjadi permasalahan yang terjadi dan dialami oleh kaum perempuan. Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadatnya, setiap daerah masing-masing memiliki adat istiadatnya yang hingga saat ini masih kental dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Bali, Bali dikenal sangat kental dengan adat istiadatnya. Masyarakat hindu di bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang dikenal dengan sistem *Purusa*. Sistem pemerintahan di Desa Adat Kesiman ini menggunakan sistem *Purusa* untuk menjalankan sistem pemerintahan desa adat itu sendiri. Sistem *Purusa* ini memposisikan kaum laki-laki berada diatas kaum perempuan, khususnya dalam ranah publik. Dalam sistem pemerintahan di Desa Adat Kesiman, perempuan tidak banyak ikut terlibat dalam partisipasi mereka untuk ikut dalam kegiatan diruang publik, perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam ruang privat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, data yang diperoleh berupa hasil wawancara, serta menggunakan teori hukum.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Desa Adat, Peran, Perempuan, Sistem Pemerintahan